

**PENDEKATAN BERPUSAT NEGARA DALAM EKONOMI POLITIK**

**Farhan Trisna Maulana<sup>1</sup>, Rahmad Riski Wahyudi<sup>2</sup>, Abi Reza Alfikri<sup>3</sup>, Akhmad Kholil<sup>4</sup>, Hotman Padewa<sup>5</sup>**

[farhanmaulana120804@gmail.com](mailto:farhanmaulana120804@gmail.com)<sup>1</sup>, [rahmadriski188@gmail.com](mailto:rahmadriski188@gmail.com)<sup>2</sup>, [abifiphone@gmail.com](mailto:abifiphone@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[akhmadkholil614@gmail.com](mailto:akhmadkholil614@gmail.com)<sup>4</sup>, [hotmanpadewa1980@gmail.com](mailto:hotmanpadewa1980@gmail.com)<sup>5</sup>

**Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung**

**ABSTRAK**

Krisis global yang dipicu oleh kegagalan pasar bebas dan dominasi neoliberalisme telah membuka kembali wacana pentingnya peran negara dalam pembangunan ekonomi, khususnya dalam konteks negara-negara mayoritas Muslim. Penelitian ini bertujuan mengkaji pendekatan berpusat negara dalam ekonomi politik Islam dengan menekankan negara sebagai aktor normatif, bukan sekadar teknokratis, dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan publik. Berlandaskan prinsip maqāsid al-sharī'ah, negara diposisikan sebagai pengarah utama dalam transformasi sosial dan ekonomi melalui kebijakan berbasis nilai Islam seperti zakat, hisbah, dan pengelolaan sumber daya untuk kemaslahatan umat. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini menyajikan kerangka konseptual integratif antara teori ekonomi politik dan nilai-nilai syariah. Temuan menunjukkan bahwa pendekatan ini menjadi alternatif strategis untuk menjawab ketimpangan ekonomi, kegagalan pasar, dan krisis kepercayaan publik di negara-negara berkembang.

**Kata Kunci:** Negara, Ekonomi Islam, Maqāsid Al-Sharī' Ah.

**PENDAHULUAN**

Krisis multidimensi yang membawa berbagai peristiwa dunia dalam beberapa dekade terakhir, sebagian besar disebabkan oleh runtuhnya pasar saham dan globalisasi neoliberal, telah menghidupkan kembali perdebatan tentang peran negara dalam pembangunan ekonomi. Keterpisahan sosial, marginalisasi kelompok rentan, dan disorientasi ekonomi semuanya berkontribusi pada pengembangan paradigma konstruksi yang sebagian besar bergantung pada mekanisme pasar. Dalam konteks ini, kebangkitan pendekatan yang berpusat pada negara menjadi relevan sebagai sarana untuk menetapkan negara sebagai aktor utama dalam memastikan keadilan dan kebersamaan, khususnya di negara-negara mayoritas muslim.

Dalam ekonomi Islam ekonomi, negara tidak berfungsi sebagai fasilitator teknis, melainkan sebagai kompas moral, penjaga nilai, dan keadilan distributif yang didasarkan pada prinsip maqāsid al-sharī'ah. Sebagai fasilitator teknis, tetapi lebih sebagai kompas moral, nilai penjaga, dan keadilan distributif yang berlandaskan prinsip maqāsid al-sharī'ah. Peran sentral ini memposisikan negara sebagai alat strategis untuk menciptakan struktur ekonomi yang tidak hanya efisien tetapi juga dapat diandalkan. Negara sebagai alat strategis untuk menciptakan struktur ekonomi yang tidak hanya efisien tetapi juga dapat diandalkan, sejalan dengan kebutuhan negara-negara muslim yang masih berjuang dengan kemiskinan struktural, oligarki, dan sistem redistribusi kekayaan yang lebih kompleks. Studi (Maboloc dkk., 2025) meneliti bagaimana kedaulatan nasional kedaulatan mungkin saja dapat digunakan sebagai solusi potensial untuk mengurangi ketegangan sosial di Mindanao, Filipina.

Di sisi lain, realitas menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di banyak negara muslim sebagian besar didasarkan pada banyak negara muslim sebagian besar didasarkan pada serangkaian paradigma teknokratik dan sekuler. Pada seperangkat paradigma teknokratis dan sekuler. Pendataan cenderung mengadopsi kerangka teori barat, yang

meskipun praktis kepraktisannya seringkali tidak sesuai dengan norma-norma Islam. Menurut (Gökçe, 2024), dilema ini diselesaikan dengan menyatakan bahwa banyak persoalan ekonomi dan politik Islam yang belum terselesaikan dalam dialog antara Islam dan masyarakat Barat tanpa menghasilkan formula sistemik yang menjadikan negara sebagai penjaga agama Islam setiap kali terjadi kemerosotan ekonomi yang sesuai, dilema ini dipecahkan dengan menyatakan bahwa masih banyak persoalan ekonomi dan politik Islam yang belum tuntas dalam dialog antara Islam dan masyarakat Barat tanpa melahirkan formula sistemik yang menempatkan negara sebagai penjaga akidah Islam setiap kali terjadi krisis ekonomi yang tepat.

Kondisi adalah ini hasil dari penelitian kecil yang secara metodis mengembangkan strategi negara dari perspektif ekonomi dan politik Islam sedikit penelitian yang secara metodis mengembangkan strategi bangsa dari perspektif ekonomi dan politik Islam. Banyak penelitian lebih berfokus pada aspek normatif atau hukum Islam tanpa menyebutkan aspek operasional organisasi publik dan kebijakan, terfokus pada aspek normatif atau hukum Islam tanpa menyinggung aspek operasional organisasi publik dan kebijakan. Misalnya misalnya, tidak banyak penelitian yang menjelaskan bagaimana suatu jelaskan bagaimana dapat menggunakan alat ekonomi seperti zakat, pajak, dan intervensi pasar dalam kerangka kerja kontemporer yang sepenuhnya konsisten dengan prinsip-prinsip Islam. Suatu negara dapat menggunakan instrumen ekonomi seperti zakat, pajak, dan intervensi pasar dalam kerangka kerja kontemporer yang sepenuhnya konsisten dengan prinsip-prinsip Islam. Kajian (Ghazwan & Afyah, 2025) membandingkan konstruksi nasional konstruksi praktik Brunei Darussalam dan Indonesia untuk menentukan seberapa baik kebijakan kedua negara tersebut selaras.

Melalui penelitian kualitatif kontekstual, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kembalinya negara sebagai aktor utama dalam politik ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kembalinya negara tersebut sebagai aktor utama dalam politik ekonomi Islam. Fokus utama akan tertuju pada bagaimana suatu negara sebuah negaramemfasilitasi transformasi sosial dan ekonomi melalui maqāṣid al-sharī'ah kerangka kerja, apakah itu dalam pengelolaan keuangan, penyaluran kekayaan mungkin memfasilitasi atau bimbingan moral dalam pemerintahan publik, transformasi sosial dan ekonomi melalui maqāṣid al-sharī'ah kerangka kerja, baik dalam pengelolaan keuangan, penyaluran kekayaan, maupun tuntunan moral dalam tata kelola publik. Dengan demikian, bangsa bangsa tidak hanya dilihat sebagai entitas administratif adalah tetapi juga sebagai entitas normatif dan transformatif, tidak hanya dilihat sebagai entitas administratif tetapi juga sebagai entitas normatif dan transformatif.

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk memberikan ide konseptual dan praktis tentang bagaimana suatu negara dapat menjadi pemimpin dalam sistem ekonomi Islam yang inklusif, partisipatif, dan kontekstual. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gagasan konseptual dan praktis tentang bagaimana suatu negara dapat menjadi pemimpin dalam sistem ekonomi Islam yang inklusif, partisipatif, dan kontekstual. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatasi permasalahan korupsi dalam literatur ekonomi dan politik Islam dengan memberikan alternatif yang tidak hanya teoritis tetapi juga praktis. Dari penelitian ini adalah untuk mengatasi masalah korupsi dalam literatur ekonomi dan politik Islam dengan memberikan alternatif yang tidak hanya teoritis tetapi juga praktis. Dalam praktiknya, diharapkan temuan penelitian ini dapat membantu pengembangan kebijakan di negara-negara muslim yang lebih inklusif dan selaras dengan prinsip-prinsip sosial Islam, berharap bahwa temuan penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan kebijakan negara-negara muslim yang lebih inklusif dan selaras dengan prinsip-prinsip sosial Islam

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan dan desain penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka, mengkaji literatur yang relevan untuk memahami Pendekatan berpusat pada negara dalam perspektif ekonomi politik islam.

#### **1. Teknik pengumpulan data**

Data dikumpulkan melalui studi literatur dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas negara sebagai pusat ekonomi, serta sumber-sumber yang membahas ekonomi politik islam.

#### **2. Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, Pendekatan berpusat pada negara dalam perspektif ekonomi politik islam berdasarkan literatur yang telah dikumpulkan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pendekatan Berpusat Negara dalam Ekonomi Politik**

Teori yang dikenal sebagai pendekatan berpusat negara dalam ekonomi politik menekankan peran negara sebagai aktor dominan dalam mengatur ekonomi negara. Metode ini menganggap negara sebagai entitas yang memiliki kemampuan untuk mengontrol berbagai bagian ekonomi yang signifikan, seperti distribusi sumber daya dan produksi. Negara bukan hanya melaksanakan kebijakan, tetapi juga berperan sebagai pembuat keputusan ekonomi, mengatur pasar, mengawasi industri strategis, dan melakukan intervensi untuk menjaga kesejahteraan umum. Metode ini muncul sebagai kritik terhadap perspektif yang lebih mengutamakan mekanisme pasar bebas, yang memungkinkan individu dan sektor swasta untuk mengatur ekonomi sendiri tanpa banyak intervensi negara. (Fine & Jomo, 2006)

Sepanjang sejarah, pendekatan berpusat negara telah muncul sebagai tanggapan terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh dominasi pasar dalam struktur kapitalisme. Sekarang dianggap bahwa negara memiliki peran yang lebih besar dalam mengatur dan mengontrol pertumbuhan ekonomi daripada hanya menjaga stabilitas hukum. Metode ini banyak digunakan oleh negara-negara pasca kolonial yang ingin mempercepat industrialisasi dan kemajuan ekonomi mereka tanpa bergantung pada kekuatan luar. Untuk menciptakan kesempatan yang lebih adil dan meratakan distribusi kekayaan, negara mengambil alih peran ekonomi yang sangat penting. (Smith, 2000)

Untuk melindungi industri domestik dari dominasi asing yang dapat membahayakan ekonomi negara, pemerintah dapat menerapkan tarif, pajak, subsidi, dan kebijakan proteksionis. Pendekatan berpusat negara berbeda dengan pendekatan pasar bebas, yang mengutamakan persaingan bebas dan individualisme. Pendekatan berpusat negara menekankan pentingnya peraturan dan pengawasan negara untuk mencegah aktor pasar melakukan tindakan eksploitatif. Negara berfungsi sebagai pengatur dan pengawas untuk memastikan bahwa setiap sektor ekonomi berjalan dengan cara yang adil dan efektif. Meskipun intervensi negara penting, metode ini juga menekankan bahwa kontrol negara harus seimbang dengan kebebasan individu untuk berinovasi dan berkompetisi di pasar (Fine & Jomo, 2006).

### **Latar Belakang Munculnya Pendekatan Berpusat Negara**

Pendekatan berpusat negara dalam ekonomi politik muncul sebagai respons terhadap kegagalan model pasar bebas yang banyak diterapkan di negara-negara kapitalis pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dalam sistem pasar bebas, negara meminimalkan perannya

dalam pengaturan ekonomi, dengan alasan bahwa pasar akan berfungsi lebih efisien jika dibiarkan beroperasi tanpa intervensi. Namun, dalam praktiknya, sistem ini seringkali menimbulkan ketimpangan ekonomi yang besar, di mana segelintir individu atau kelompok memiliki kekayaan yang sangat besar sementara sebagian besar masyarakat hidup dalam kemiskinan. Ketidakadilan sosial yang timbul dari sistem ini memunculkan kritik terhadap kapitalisme yang menekankan pada kebebasan pasar tanpa memperhatikan kesejahteraan sosial.(Harvey, 2007)

Metode pasar bebas dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial yang mendalam di banyak negara berkembang yang telah mengalami pergeseran dari kolonialisme. Untuk memastikan bahwa pembangunan dapat berjalan secara merata, negara-negara ini merasa perlu mengambil bagian lebih aktif dalam mengatur ekonomi. Negara bertanggung jawab untuk menentukan arah kebijakan ekonomi dan mengintervensi pasar untuk menciptakan peluang yang lebih adil bagi semua orang. Konsep ini terutama digunakan setelah Perang Dunia II, ketika banyak negara berkembang memulai industrialisasi dan modernisasi ekonomi mereka untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap negara maju.(Germain, 2003)

### **Peran Negara dalam Sistem Ekonomi**

Negara memainkan peran penting dalam sistem ekonomi, terutama dalam pendekatan berpusat negara, yang mencakup berbagai aspek kebijakan yang berkontribusi pada pengaturan dan pengelolaan pasar. Negara bertindak sebagai pemain ekonomi utama dan regulator sekaligus regulator. Negara memiliki otoritas untuk menetapkan kebijakan perdagangan, fiskal, dan moneter yang berdampak pada semua aspek ekonomi, mulai dari pengaturan harga hingga pengelolaan industri penting seperti energi, pertanian, dan transportasi. Dalam situasi seperti ini, negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pasar beroperasi secara adil dan efektif serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan untuk pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Dalam buku mereka *Theories of Political Economy* (1992), James Caporaso dan David Levine mengatakan bahwa negara berfungsi sebagai lembaga yang bertujuan untuk mencapai stabilitas sosial melalui pengaturan dan pengembangan ekonomi.(Caporaso & Levine, 1992)

Caporaso dan Levine menekankan bahwa negara harus menjaga keseimbangan antara kebebasan pasar dan kepentingan publik, serta memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang dibuat dapat memenuhi kebutuhan sosial dan mengurangi kesenjangan sosial. Dibandingkan dengan negara maju yang bergantung pada mekanisme pasar bebas, peran negara dalam ekonomi sering kali lebih dominan di negara berkembang. Negara menggunakan negara untuk mempercepat industrialisasi dan modernisasi ekonomi, terutama negara-negara berkembang yang baru merdeka dari kolonialisme. Mereka percaya bahwa untuk mengurangi ketergantungan mereka pada negara-negara maju dan perusahaan multinasional yang dapat mengeksploitasi sumber daya alam mereka, mereka harus mengawasi sektor ekonomi yang sangat penting. Negara harus menyeimbangkan peran pengaturannya dan memberi ruang bagi sektor swasta dan pasar untuk berkembang karena terlalu banyak kontrol negara dapat menyebabkan birokratisasi yang tidak efektif, yang dapat menghambat pertumbuhan dan inovasi ekonomi.

### **Negara sebagai Alat untuk Mencapai Tujuan Pribadi**

Banyak kali, negara tidak hanya dianggap sebagai entitas yang mengatur dan mengelola ekonomi untuk kesejahteraan umum, tetapi juga sering digunakan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan pribadi mereka sendiri. Pendekatan berpusat negara dapat membantu pemusatan kekuasaan, yang memungkinkan pemimpin untuk menggunakan negara sebagai sarana untuk memperkaya diri atau memperkuat posisi politik

mereka. Hal ini sangat jelas terjadi di banyak negara yang menggunakan model negara sentralistik, di mana ekonomi dan pemerintahan sangat terkait satu sama lain dan sulit dipisahkan. Korupsi yang melibatkan pejabat negara adalah salah satu contoh tradisional bagaimana negara digunakan untuk kepentingan pribadi. Misalnya, negara sering menjadi alat bagi para politisi untuk memanfaatkan sumber daya negara untuk keuntungan pribadi atau kelompok mereka sendiri. Sebagai contoh, selama pemerintahan Orde Baru, pemerintah menggunakan kontrol negara terhadap sektor ekonomi untuk menguntungkan kelompok bisnis yang mereka dukung dan diri mereka sendiri.(Arma, 2024)

Menurut *Theories of Political Economy* yang ditulis oleh James Caporaso dan David Levine (1992), negara sering kali berfungsi sebagai bukan hanya pengatur tetapi juga sebagai alat yang dapat digunakan oleh para politisi untuk memperkuat kekuasaan mereka. Negara seringkali dikuasai oleh orang-orang yang menggunakan posisi mereka untuk mendukung agenda pribadi atau kelompok tertentu, meskipun seharusnya berfungsi untuk memenuhi kepentingan publik.(Sihombing dkk., 2023)

### **Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan Negara dalam Ekonomi Politik**

Dalam ekonomi politik, penggunaan kekuasaan negara dapat berdampak buruk secara struktural dan kultural. Kepercayaan publik terhadap negara sebagai institusi akan menurun tajam ketika kekuasaan digunakan untuk memperkaya individu atau kelompok tertentu daripada kepentingan umum. Dalam bukunya *Globalisasi dan Negara* (2012), Budi Winarno mengatakan bahwa krisis kepercayaan ini mengakibatkan masyarakat menjadi apatis terhadap proses politik dan ekonomi. Akibatnya, ruang partisipasi publik semakin terbatas dan kekuasaan semakin memberi ruang pada kelompok tertentu.(Saragih & Nababan, 2021)

Kekuatan negara di sektor ekonomi juga mempengaruhi investasi dan pertumbuhan. Investor, baik dari dalam maupun luar negeri, ragu untuk berinvestasi karena menembus hukum dan melakukan praktik koruptif. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil ini, inovasi terhambat dan daya saing nasional menurun. Karena akses terbatas ke pekerjaan, sekolah, dan layanan publik, orang-orang kembali menjadi korban utama. Selain itu, dampak kultural dari perlindungan kekuasaan negara menyebabkan masyarakat menjadi lebih toleran terhadap ketidakadilan. Kejujuran, tanggung jawab, dan integritas akan hilang ketika masyarakat terbiasa dengan pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan tanpa konsekuensi. Korupsi menjadi bagian dari "budaya" politik yang tidak dapat dihindari oleh masyarakat, dan ini merupakan bahaya yang sulit dihindari dalam jangka panjang. Faisal Basri mengingatkan bahwa negara dapat berubah menjadi alat eksklusif para elit untuk memonopoli kekayaan dan kekuasaan jika tidak ada institusi negara dan penguatan akuntabilitas.(Edu dkk., 2017)

## **KESIMPULAN**

Dalam ekonomi politik Islam, pendekatan berpusat pada negara menawarkan kerangka strategis di mana negara berperan sebagai organisasi administratif dan sebagai aktor yang membawa perubahan. Berdasarkan prinsip *maqāṣid al-sharī‘ah*, yang melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, negara diposisikan sebagai pengarah utama pembangunan sosial dan ekonomi. Sistem ekonomi yang dibangun melalui kombinasi intervensi negara dan prinsip-prinsip Islam berfokus pada efisiensi serta keseimbangan sosial, keadilan distributif, dan kepedulian terhadap kelompok yang rentan. Model ini dianggap berguna untuk menjawab masalah globalisasi, ketimpangan ekonomi, dan kegagalan pasar bebas di banyak negara berkembang, terutama yang memiliki mayoritas penduduk Muslim.

Pendekatan berpusat pada negara dalam ekonomi politik Islam menawarkan kerangka strategis untuk peran negara sebagai aktor transformasi dan organisasi administratif. Negara diposisikan sebagai pengarah utama kemajuan sosial dan ekonomi berdasarkan prinsip maqāsid al-sharī'ah, yang melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sistem ekonomi yang dibangun melalui kombinasi intervensi negara dan prinsip-prinsip Islam berfokus pada efisiensi dan keseimbangan sosial, keadilan distributif, dan kepedulian terhadap kelompok yang rentan. Dianggap bermanfaat, model ini dapat digunakan untuk memecahkan masalah globalisasi, ketimpangan ekonomi, dan kegagalan pasar bebas yang terjadi di banyak negara berkembang, terutama di negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Bagir, Z., & Hefner, R. W. (2021). *Indonesian Pluralities: Islam, Citizenship, and Democracy*. University of Notre Dame Press. [https://muse.jhu.edu/pub/200/edited\\_volume/book/99093](https://muse.jhu.edu/pub/200/edited_volume/book/99093)
- Al-Mansouri, E. (2025). Is Bitcoin Haram in Sharia? A Methodological Critique of the Prohibition Fatwa. *Journal of Balkan Economies and Management*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.51331/bemA06>
- Arma, N. A. (2024). Implementasi Kebijakan Pembangunan Melalui Pendekatan Komunikasi dalam Mewujudkan Desa Sejahtera di Desa Bulu Cina. *DINAMIKA REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK Tantangan Dan Peluang Di Era Global*, 151.
- Caporaso, J. A., & Levine, D. P. (1992). *Theories of political economy*. Cambridge University Press.
- Edu, A., Arifin, F., & Nardi, M. (2017). *Etika dan Tantangan Profesionalisme Guru*. Alfabeta Bandung.
- Fine, B., & Jomo, K. S. (2006). *The new development economics: After the Washington consensus*. Delhi: Tulika; London: Zed Press.
- Germain, R. D. (2003). *Globalization and Its Discontents*. By Joseph E. Stiglitz. New York: WW Norton & Company, 2002. Xx+282pp. Index, notes. Cloth, 15.95. ISBN: cloth 0-393-05124-2; paper 0-393-32439-7. *Business History Review*, 77(2), 344–347.
- Ghazwan, A. A. H., & Afyah, I. (2025). Civilizational Synergy in Southeast Asia: Comparative Insights on Islamic Development in Indonesia and Brunei Darussalam. *Solo International Collaboration and Publication of Social Sciences and Humanities*, 3(03), 329–342.
- Gökçe, E. U. (2024). A Philosophical Inquiry into the Limits of Constructing Western-Centric International Relations Theory in Islam. *Marife Dini Araştırmalar Dergisi*, 24(2), 309–335.
- Harvey, D. (2007). *A brief history of neoliberalism*. Oxford university press.
- Kayaoglu, T. (2013). A Rights Agenda for the Muslim World: The Organization of Islamic Cooperation's Evolving Human Rights Framework. *APSA 2013 Annual Meeting Paper, American Political Science Association 2013 Annual Meeting*.
- Maboloc, C. R., Lidasan, M., Limba, M., & Salik, R. (2025). Unveiling Structural Poverty in Muslim Mindanao: Focus on Power Dynamics and Economic Injustice. *Southeastern Philippines Journal of Research and Development*, 30(1), 21–34.
- Metcalf, B. D., Bastian, B. L., & Al-Dajani, H. (2022). *Women, entrepreneurship and development in the middle East*. Routledge.
- O'Brien, R. (with Williams, M.). (2016). *Global political economy: Evolution & dynamics* (5th edition.). Macmillan Education.
- Saragih, H. M., & Nababan, R. S. (2021). Kebijakan Jerman atas Pemberian Suaka Terhadap Pengungsi Asal Suriah Tahun 2015-2016. *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 5(1).
- Sihombing, S., Raja, R. L., & Simorangkir, T. (2023). Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pelayanan Informasi Publik Dalam Perspektif Jemaat Sebagai Masyarakat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), Article 2.

- Skocpol, T. (1985). Bringing the State Back In: Strategies of Analysis in Current Research. Dalam D. Rueschemeyer, P. B. Evans, & T. Skocpol (Ed.), *Bringing the State Back In* (hlm. 3–38). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511628283.002>
- Smith, A. (2000). *The Wealth of Nations*. Random House Publishing Group.
- Syed, A. M., & Subhani, Z. H. (2018). Pluralism, Constitutionalism and Islamic Political Thought. *Researching Islam in Global Village*, New Delhi: CERT, 381–410.
- Weiss, L., & Hobson, J. M. (2005). *States and Economic Development: A Comparative Historical Analysis*. Polity.